

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

PT Bank Ina Perdana Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) No. COM/001/01/1215 terbit tanggal 1 Desember 2015 yang merupakan *up dating* dari Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola pada Bank, adalah sebagai berikut:

- A. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

B. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan Corporate Values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *Check and Balance* dalam pengelolaan Bank.

C. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

D. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

E. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*Equal Treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Bank telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2016 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposures*);

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/024/0117 tanggal 31 Januari 2017 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II/2016, Laporan Penghitungan KPMM Sesuai dengan Profil Risiko semester II/2016 dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Semester II/2016.

- 000 -

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-47/PB311/201 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, menegaskan bahwa Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSPT) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat BI No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
 - b. Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- c. Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
4. Tidak ada Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK, semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	8	8	100%
2	Hari Sugiharto	8	8	100%
3	Winadewi Hanantha	8	8	100%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 tertuang pada Akta No. 40 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 12 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et Decharge*) kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2015.
2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.
7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I/2016 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/KOM/002/0816 tanggal 29 Agustus 2016, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II/2015 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/001/0216 Tanggal 22 Februari 2016.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi Anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih dalam koridor ketentuan OJK.

a. Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/003/0214 Tanggal 5 Februari 2014 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto 2. Dr. Timotius 3. Edy Sukarno	Komisaris Independen Pihak Independen Pihak Independen

Pengangkatan Anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *Track Record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Audit.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas *Internal Audit Group*;
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan *Internal Audit Group*, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali diikuti oleh:

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	6	4	67%
Hari Sugiharto	6	6	100%
Dr. Timotius	6	5	83%
Edy Sukarno	6	4	67%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

- 1). Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- 2). Pembahasan Hasil Temuan Audit

Agenda rapat tanggal 26 Januari 2016 adalah pembahasan hasil Audit Cabang Surabaya, Capem Kembang Jepun, Cabang Bandung, Capem Jatinegara dan Cabang Pasar Minggu.

Saran Komite agar *General Affairs* masing-masing cabang melakukan *stock opname* secara periodik barang-barang inventaris kantor paling tidak 6 bulan sekali. Komite juga menyarankan adanya rencana jenjang karir yang jelas untuk karyawan.

- 3). Pembahasan Hasil Audit KAP

Agenda rapat pada tanggal 8 Maret 2016 adalah pembahasan *Closing Meeting Audit* dengan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015.

- 4). Dalam Rapat tanggal 14 September 2016, dilakukan Pembahasan KAP yang akan melaksanakan pekerjaan audit PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun buku 2016.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Komite merekomendasikan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young untuk melaksanakan pekerjaan audit PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun buku 2016, serta Pemeriksaan Laporan Keuangan Januari s.d September 2016 untuk kepentingan Penawaran Umum Terbatas II (*Right Issue II*).

- 5). Agenda rapat tanggal 16 Desember 2016 adalah *Kick off meeting*-Audit Komite dengan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young yang akan melaksanakan audit Bank Tahun buku 31 Desember 2016.
- 6). Komite Audit meminta agar KAP melaksanakan *On The Spot* kepada Debitur *Multi Finance*.

b. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0612 Tanggal 29 Juni 2012 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Pemantau Risiko", dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Winadewi Hanantha 3. Dr. Timotius 4. Edy Sukarno	Komisaris Utama Independen Komisaris Pihak Independen Pihak Independen

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *Track Record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1.) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko;

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- 2.) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali diikuti oleh:

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	4	4	100%
Birawa Natapradja	4	2	50%
Winadewi Hanantha	4	4	100%
Dr. Timotius	4	4	100%
Edy Sukarno	4	4	100%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1.) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- 2.) Hasil pemantauan terhadap risiko yang dihadapi Bank.

Peringkat Risiko Komposit Bank di Triwulan III/2016 dinilai dalam Peringkat 2 atau "*Low to Moderate*". Secara *aggregate* tingkat risiko Bank cenderung meningkat karena meningkatnya risiko kredit yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio NPL dan kredit berkualitas rendah.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank per posisi Juni 2016 dinilai "Sehat" dengan penilaian Profil Risiko; GCG; Rentabilitas dan Permodalan dinilai 2 (dua).

- 3.) Dalam upaya meningkatkan pengelolaan SDM, Komite Pemantau Risiko merekomendasikan:

Perlu ditingkatkan program pelatihan terutama dalam bidang perkreditan antara lain pemberian pelatihan kepada Petugas appraisal dan peningkatan kemampuan AO dalam melakukan analisa.

- 4.) Komite Pemantau Risiko juga merekomendasikan:

- a.) Peningkatan *Internal Control* dalam proses pencairan kredit untuk memastikan bahwa kredit yang dicairkan telah sesuai dengan keputusan Komite Kredit dan dilakukan monitoring terhadap pemenuhan *Covenant* yang telah diputuskan Komite Kredit.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- b.) Agar dipastikan bahwa pelaksanaan monitoring kredit telah dilakukan dengan mencegah penggunaan fasilitas kredit yang kurang sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas.
 - c.) Pengendalian risiko operasional agar dilakukan dengan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang berulang melalui peningkatan *Internal Control* dalam proses transaksi.
- 5.) Sehubungan dengan Aksi Korporasi dalam rangka untuk meningkatkan permodalan Bank melalui *Right Issue* tahap 2, Komite Pemantau Risiko merekomendasikan agar dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan proses *Right Issue* tahap 2.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/013a/1215 Tanggal 1 Desember 2015 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Remunerasi dan Nominasi", dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Winadewi Hanantha 3. Agnes Sri Lestari	Komisaris Utama Independen Komisaris Perwakilan Karyawan

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1.) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a.) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *Peer Group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - b.) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c.) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- d.) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- 2.) Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a.) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b.) Memberikan rekomendasi mengenai calon Anggota Direksi dan/atau calon Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - c.) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali diikuti oleh:

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	6	6	100%
Birawa Natapradja	6	3	50%
Winadewi Hanantha	6	6	100%
Agnes Sri Lestari	6	6	100%

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1.) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2.) Setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap data dan informasi, disimpulkan bahwa kompetensi, pengalaman dan *Track Record* Sdr. Josavia Rachman Ichwan telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi dan diyakini akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Bank, untuk itu Komite merekomendasikan Sdr. Josavia Rachman Ichwan sebagai Direktur Bisnis Bank, dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.
- 3.) Komite mengusulkan kenaikan Upah Minimum Regional sebagai acuan penyesuaian gaji karyawan dan diberlakukan mulai bulan Januari 2016.
- 4.) Komite mengusulkan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- 5.) Komite mengusulkan Pemberian Isentif antara lain berdasarkan *Performance Appraisal* tahun 2015 disamping pertimbangan lainnya yaitu prestasi-prestasi khusus yang telah dicapai.
- 6.) Komite mengusulkan Pemberian gaji ke 14 (tunjangan akhir tahun) bagi Karyawan dan Pengurus pada tanggal 9 Desember 2016.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi, dapat dilihat antara lain:

1. Untuk lebih mendorong pertumbuhan bisnis khususnya Dana Pihak Ketiga dan Kredit, maka perlu adanya dukungan jumlah dan kualitas SDM yang lebih memadai guna mendapatkan kredit dengan kualitas yang baik melalui pemberian kredit yang sehat. Untuk itu perlu menambah SDM bidang marketing (*Direct Revenue*) untuk ditempatkan di sejumlah kantor cabang tertentu.
2. Dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Maret 2016, Anggota Rapat secara aklamasi menunjuk Bpk. Birawa Natapradja sebagai Pimpinan RUPS yang akan diselenggarakan tanggal 12 Mei 2016.
3. Mencermati hasil Laporan Keuangan posisi akhir April 2016, tercermin NPL yang meningkat, mengharuskan perhatian dari Manajemen untuk mengambil langkah aktif dalam menyelesaikan kredit-kredit bermasalah tersebut di samping menjaga kredit yang masih lancar lainnya, diantaranya melalui peningkatan kehati-hatian dalam melakukan proses pemberian kredit.
4. Meminta kepada jajaran Direksi untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan fungsi *Internal Control* di masing-masing cabang/unit kerja diantaranya melalui peningkatan peran setiap Supervisor dalam melakukan *control* pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh *subordinate*-nya masing-masing.
5. Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis yang sehat, maka beberapa hal yang perlu menjadi *concern* Manajemen diantaranya:
 - a. Menekan tingkat NPL melalui penyelesaian kredit bermasalah yang jumlahnya beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan, terutama kredit program yang disalurkan melalui *Multi Finance*.
 - b. Meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian kredit baru ke sektor yang dianggap aman dan eksis di tengah kondisi ekonomi global yang belum kondusif.
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap kredit dalam perhatian khusus yang beberapa bulan terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat supaya tidak jatuh menjadi NPL.
6. Penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

7. Dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Oktober 2016, Anggota Rapat secara aklamasi menunjuk Bpk. Birawa Natapradja sebagai Pimpinan RUPSLB yang akan diselenggarakan tanggal 4 November 2016.
8. Meminta kepada Manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pemrosesan dan analisa kredit, serta monitoring kegiatan debitur secara lebih ketat sehingga dapat diketahui kondisi dini debitur secara baik.
9. Sehubungan telah dilakukannya penunjukan KAP Publik, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah meminta KAP untuk menjelaskan segala sesuatu terkait dengan rencana tugas dan tanggung jawabnya sebagai Akuntan Publik.

- 000 -

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam upaya mempercepat pengembangan bisnis Bank kedepan, Bank merasa perlu untuk menambah Pengurus Bank, untuk itu Sdr. Josavia Rachman Ichwan diajukan menjadi Direktur Bisnis.

Dari hasil *Fit and Proper Test* yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2016, OJK telah menyetujui Sdr. Josavia Rachman Ichwan sebagai Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk, yang disampaikan melalui Surat No. SR-65/D.03/2016 Tanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk.

Dengan adanya persetujuan dari OJK, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016 dituangkan dalam akta No. 42 tanggal 12 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, diantaranya telah memutuskan mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menambah seorang Direktur yang baru. Susunan Pengurus ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/063A/0516 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk.

OJK melalui surat No. S-47/PB311/201 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, menegaskan bahwa Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Edy Kuntardjo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat BI No. 13/90/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 9 Agustus 2011 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - b. Wardoyo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat BI No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - c. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Operasional melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
 - d. Josavia Rachman Ichwan disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Bisnis melalui Surat OJK No. SR-65/D.03/2016 Tanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank Ina Perdana dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/01/1215 – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 3. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016. Pelaksanaan tugas tahun 2015 tertuang pada Akta No. 40 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 12 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et Decharge*) kepada seluruh Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2015.
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari *Internal Audit Group*, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

a. Pengarahan Direksi

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *Fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud* maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud* pada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Dalam Acara ini, Direktur Kepatuhan (Dirkep) turut memberikan pengarahan kepada Peserta Sosialisasi, dimana Dirkep memberi motivasi kepada Peserta agar bekerja dengan baik dan senantiasa mengembangkan diri, jujur dan tetap menjauhkan diri dari tindakan *Fraud* yang dapat merugikan Perusahaan demikian juga diri sendiri.

b. *Sense of Belonging*

Manajemen menyadari bahwa kekompakan dan kebersamaan serta rasa saling memiliki (*Sense of Belonging*) terhadap Bank dirasa merupakan suatu hal yang penting yang menjadi pendorong sikap saling menjaga dan memelihara semua asset Bank, baik itu yang bernilai material maupun non material (*Reputasi, Good Will*).

Dalam rangka menjalin kebersamaan di kalangan karyawan, maka pada tanggal 17 s.d 18 September 2016 Bank telah melaksanakan *Employee Gathering*. Rencana semula *Employee Gathering* dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 namun karena ada kendala pengadaaan tiket pesawat maka di undur menjadi bulan September 2016. *Employee Gathering* ini dilaksanakan di Pulau Belitung, diikuti sebanyak 280 orang terdiri dari karyawan dan Pengurus Bank serta seorang PSP/PSPT. Dalam kesempatan tersebut Bp. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama memberikan arahan kepada semua karyawan.

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk:

a. *Internal Audit Group*

Internal Audit Group bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. *Internal Audit Group* dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada OJK.

c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Satuan Kerja Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- a. Komite Kredit;
- b. Komite Kebijaksanaan Perkreditan Bank;
- c. ALCO;
- d. Komite IT *Steering*;
- e. Komite Strategi *Planning & Budgeting*;
- f. Komite Sumber Daya Manusia.

Sepanjang tahun 2016 telah diadakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi, yang diikuti oleh:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	12	12	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	12	12	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	12	12	100%
4	Josavia Rachman Ichwan *)	Direktur Bisnis	8	8	100%

*) Efektif tanggal 12 Mei 2016

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi

Dalam tahun 2016, telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sebanyak 8 (delapan) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dalam tahun 2016:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	8	8	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	8	8	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	8	7	88%
4	Josavia Rachman Ichwan *)	Direktur Bisnis	6	5	83%
5	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	8	4	50%
6	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	8	7	88%
7	Winadewi Hanantha	Komisaris	8	7	88%

Catatan : *) Efektif tanggal 12 Mei 2016

- 000 -

BAB IV

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, diuraikan sebagai berikut:

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016, yang dihadiri sebanyak 98,98% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen) Pemegang Saham Perseroan diantaranya memutuskan menyetujui penambahan modal Bank, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 625 Juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham baru, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp240. Saham yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Berdasarkan Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) PT Bank Ina Perdana Tbk, telah terjual seluruh saham yang ditawarkan yakni sebanyak 625 Juta lembar saham dengan Harga Penawaran Saham Rp240, sehingga Dana Setoran PUT I sebesar Rp150 miliar. Dalam PUT I tersebut, PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja sebagai PSP Bank melaksanakan seluruh haknya atas HMETD, maka porsi kepemilikan saham mereka tetap yakni PT Philadel Terra Lestari sebanyak 20% (dua puluh persen) dan Bpk. Oki Widjaja sebanyak 4% (empat persen). Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT I, seluruhnya digunakan untuk mencukupi Alokasi Modal Inti (AMI) sesuai dengan jaringan kantor.

Pada Semester II/2016 terjadi Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank seperti berikut:

1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 30 Juni 2016

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	84.030.000	Rp8.403.000.000	4,00%
2	OCBC Securities Pte Ltd-Client A/C	790.000.000	Rp79.000.000.000	37,62%
3	PT Philadel Terra Lestari	420.000.000	Rp42.000.000.000	20,00%
4	Masyarakat dalam penitipan kolektif	805.970.000	Rp80.597.000.000	38,38%
Total		2.100.000.000	Rp210.000.000.000	100,00%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank adalah PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja, sedangkan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Oki Widjaja.

2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 28 Juli 2016 (setelah PUT I)

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	4,00%
2	OCBC <i>Securities Pte Ltd-Client A/C</i>	790.000.000	Rp79.000.000.000	28,99%
3	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	20,00%
4	PT Indolife Pensionsama	468.596.420	Rp46.859.642.000	17,20%
5	Masyarakat dalam penitipan kolektif	812.364.652	Rp81.236.465.200	29,81%
Total		2.725.000.000	Rp272.500.000.00	100,00%

3. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Juli 2016

Dengan adanya transaksi Perdagangan Saham Bank (BINA) yang terjadi di Bursa Saham menyebabkan Komposisi Kepemilikan Saham Bank mengalami perubahan.

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	4,00%
2	OCBC <i>Securities Pte Ltd-Client A/C</i>	790.000.000	Rp79.000.000.000	28,99%
3	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	20,00%
4	PT Indolife Pensionsama	470.092.720	Rp47.009.272.000	17,25%
5	Masyarakat dalam penitipan kolektif	810.868.352	Rp81.086.835.200	29,76%
Total		2.725.000.000	Rp272.500.000.00	100,00%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

4. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2016

Dengan adanya transaksi Perdagangan Saham Bank (BINA) yang terjadi di Bursa Saham pada bulan Desember 2016, menyebabkan Komposisi Kepemilikan Saham Bank mengalami perubahan.

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	4,00%
2	OCBC <i>Securities</i> Pte Ltd- <i>Client</i> A/C	790.000.000	Rp79.000.000.000	28,99%
3	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	20,00%
4	PT Indolife Pensionsama	470.092.720	Rp47.009.272.000	17,25%
5	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	498.514.000	Rp49.851.400.000	18,29%
6	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	285.970.000	Rp28.597.000.000	10,49%
7	Masyarakat dalam penitipan kolektif	26.384.352	Rp2.638.435.200	0,98%
Total		2.725.000.000	Rp272.500.000.000	100,00%

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2016, yang dihadiri sebanyak 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) Pemegang Saham Perseroan memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 2.929.375.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham baru. Saham yang diterbitkan dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Jumlah dana yang diterima Perseroan dalam PUT II adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp703.050.000.000. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT II, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan Modal Inti Perseroan sehingga dinilai Bank akan mampu memenuhi syarat sebagai Bank BUKU 2 dan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis untuk meningkatkan keuntungan Bank.

Sepanjang tahun 2016, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Bank Ina Perdana, bank lain maupun LKBB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB*)	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Edy Kuntardjo	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis	0%	0%	0%	0%

Catatan : *) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2016, disajikan sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi **)	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura *)	3	1.586	4	4.540
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	63	-	82
Total	3	1.649	4	4.622

Catatan : *) Diterima secara tunai

**) Efektif tanggal 12 Mei 2016 Anggota Direksi bertambah 1 orang, menjadi 4 orang

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2016 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi **)	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	3	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

*) Yang diterima secara tunai

**) Efektif tanggal 12 Mei 2016 Anggota Direksi bertambah 1 orang, menjadi 4 orang

D. Share Option

Di dalam komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2016, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank. Adapun kepemilikan saham ini dilakukan melalui Program *Employee Stock Allocation* (ESA) dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli Saham Bank pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan Program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*Sense of Belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja dan kinerja sehingga *Going Concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik yang dapat dinikmati oleh *Stakeholders* Perseroan. Dalam tahun 2016, tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi.

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	29.244	21.500	0	240/lbr	N.A
Total		0	0	0	N.A	N.A

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- ~ Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 26,04 x
- ~ Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,57 x
- ~ Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,11 x
- ~ Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,34 x

F. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *Fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud* pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Dalam Acara ini, Direktur Kepatuhan (Dirkep) ikut serta memberikan pengarahan kepada Peserta Sosialisasi, dimana Dirkep memberi motivasi kepada Peserta agar bekerja dengan baik dan senantiasa mengembangkan diri, jujur dan tetap menjauhkan diri dari tindakan *Fraud* yang dapat merugikan Perusahaan demikian juga diri sendiri.

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi *Anti Fraud* maka secara berkala dilakukan *BI Checking* kepada seluruh Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan salah satu unsur penyebab terjadinya *Fraud* berupa *Pressure* (tekanan) yang dialami Karyawan.

Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2016 antara lain:

1. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
2. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
3. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
4. *Whistleblower*

Whistle Blowing sebagai Strategi deteksi *Fraud* sebagaimana yang ada dalam kebijakan Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan memberikan dorongan kesadaran kepada Pegawai dan Pejabat Bank untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi, menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan agar menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya Karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *Fraud* (sebagai *Whistle Blower*).

5. Program *Surprise Audit*.

Internal Audit Group melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang/ Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Dalam periode laporan ini, ditemukan ada terjadi *Fraud* namun tidak sampai merugikan Bank secara materil. *Fraud* ini terjadi di satu kantor cabang sebagai akibat kelemahan pengendalian *intern* di cabang, sebagai berikut:

1. Adanya calon Debitur Bank Commonwealth yang menggunakan Deposito Bank Ina Perdana sebagai bukti kepemilikan *asset* debitur yang setelah dilakukan konfirmasi oleh Bank Commonwealth ke Bank Ina Perdana diketahui bahwa bilyet deposito tersebut tidak tercatat di Bank Ina Perdana.
2. Terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan uang muka biaya untuk kepentingan pribadi pejabat akibat kelemahan aspek pengendalian *intern* di cabang yang dapat terdeteksi dalam pelaksanaan audit oleh *Internal Audit Group*.

Jumlah internal *Fraud* tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

G. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2016 tidak ada Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Sebagaimana kami sampaikan dalam laporan periode sebelumnya bahwa ada Permasalahan Hukum dengan PPA yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007. Untuk memitigasi risikonya maka pada akhir bulan Desember 2012, Bank telah mencadangkan dana sebesar Rp1.419.039.389 yakni 100% (seratus persen) dari perkiraan tagihan PPA. Sepanjang tahun 2016 tidak ada penagihan dari Pihak PPA, namun demikian Bank masih tetap membukukan dana tersebut di atas dalam bentuk cadangan, sebagai langkahantisipasi bilamana kesepakatan dengan PPA dapat tercapai pada tahun 2017. Dengan adanya cadangan ini maka risiko dari tagihan PPA telah dapat *discover* sepenuhnya.

H. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
2. Direksi Bank beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Bisnis yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *Check and Balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun suatu ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara Training Strategi *Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”.

Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank Ina serta *intranewsina*.

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan :

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

I. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*

Sepanjang tahun 2016 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

J. **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2016 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2016 secara total disajikan sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait *)	18	94.934
2	Debitur Inti	15	612.599

Catatan : *) termasuk penyediaan dana *cash collateral*

K. **Rencana Strategis Bank**

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

a. Strategi Perusahaan

- 1.) Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 1.
- 2.) Melakukan pembenahan infrastruktur, terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional.
- 3.) Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *Cost of Fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- 4.) Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar, baik yang bersifat *Hard Skill* maupun *Soft Skill*.
- b. Kebijakan dan strategi manajemen
 - 1.) Perspektif keuangan
 - a.) Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan *Cost of Fund* ideal.
 - b.) Pencapaian rasio rentabilitas sesuai indikator tingkat kesehatan pada peringkat PK-2 (Sehat).
 - c.) Memelihara kualitas aktiva produktif pada rasio rendah di bawah 2%.
 - d.) Menjaga kecukupan pemenuhan (CAR) pada rasio 12% - 14%.
 - 2.) Perspektif Pelanggan
 - a.) Pertumbuhan kredit komersial produktif dengan target minimal 55% dari total kredit, termasuk pencapaian pembiayaan UMKM minimal 20% dari total kredit.
 - b.) Perluasan *Customer Base funding*, khususnya potensi di kalangan sekolah/universitas Kristen yang tersebar luas di berbagai kota, yang saat ini baru terlayani 5% - 10%.
 - c.) Menjalinkan kerjasama dengan institusi sekolah/perusahaan untuk pengembangan kredit konsumsi (KTA, KPR dan KKB) dan pengembangan *Wholesale Banking* yaitu kemitraan dengan institusi keuangan sebagai penyeimbang pencapaian target kredit.
 - d.) Meningkatkan kualitas layanan cabang (*Service Excellence*).
 - 3.) Perspektif Proses Bisnis Internal
 - a.) Penguatan implementasi *Good Corporate Governance* dan *Risk Management*, produktivitas karyawan dan budaya *Anti Fraud*.
 - b.) Perbaikan *Business Process*, diantaranya penyederhanaan proses kredit, peningkatan *Product Development Process*.
 - 4.) Perspektif Pengembangan
 - a.) Program pendidikan – *Officer Development Program* (ODP).
 - b.) Pembenahan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu segi kebijakan, segi *assessment* dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, serta segi administrasi dan *system* informasi.
2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2016 – 2018 diterbitkan tanggal 28 Nopember 2015.

 - a. Target Jangka Pendek (Tahun 2016)

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Mempertimbangkan kinerja Bank tahun 2015 dengan fundamental aspek *prudential* yang tetap terjaga dengan baik dan rencana penambahan modal melalui *Right Issue* pada triwulan II/2016 serta kondisi perekonomian tahun 2015 yang tidak sepenuhnya kondusif sehingga perlu dimitigasi dengan baik termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga *The Fed*, maka kegiatan usaha tahun 2016 tetap konservatif berpedoman pada tema “*Sustainable and Quality Growth*” dengan pertumbuhan kredit sebesar 12%. Pengelolaan Bank mengutamakan kecukupan permodalan dan pemantauan terhadap likuiditas sehingga Bank dapat beroperasi secara sehat, efisien dan berdaya saing.

Setelah efektifnya PSP/ PSPT baru, manajemen juga fokus mempersiapkan arah bisnis jangka panjang sesuai *Corporate Plan* Pemegang Saham Pengendali. Pada tahun 2016 mulai masuk pada tahapan “transformasi infrastruktur” yaitu membenahan infrastruktur sumber daya manusia dan informasi teknologi untuk dapat menyiapkan *core* bisnis model yang baru serta kecukupan terselenggaranya internal *control*. Pada tahapan ini bisnis Bank masih mengandalkan bisnis *existing*.

1.) Target Finansial

- a.) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp303,46 miliar menjadi Rp1,92 triliun pada akhir Desember 2016, tumbuh 19% dibanding posisi proyeksi akhir Desember 2015.
- b.) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp167,95 miliar menjadi Rp1,56 triliun, tumbuh 12% dari posisi proyeksi akhir Desember 2015, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) mencapai 80%, dan porsi kredit kepada sektor UMKM mencapai 44% dari total *portfolio* kredit.
- c.) Pertumbuhan total aset sebesar Rp322,78 miliar menjadi Rp2,44 triliun di Desember 2016.
- d.) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp16,82 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp89,35 miliar.
- e.) Dilakukan penambahan modal melalui *Right Issue* pada triwulan II/2016 sebesar Rp150 miliar untuk memenuhi besaran modal inti sesuai jaringan kantor yang dimiliki.

2.) Target Non Finansial

- a.) Target Bisnis
 - i. Pemberian kredit untuk tahun 2016 diarahkan ke sektor komersial produktif dengan target 80% dan sisanya 20% konsumsi sehingga mampu memenuhi target *portfolio* kredit produktif Bank skala BUKU 1 sebesar 55% dari total *portfolio* kredit, termasuk 20% UMKM. Bisnis masih mengandalkan konsep B2B atau *Wholesale banking* melalui kerjasama dengan *Multi Finance*, BPR, Koperasi, dan perusahaan ventura dalam kaitan pembiayaan usaha-usaha kecil dan mikro produktif.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Khusus kerja sama dengan *Multi Finance* dibatasi pertumbuhannya sehingga Bank tidak mempunyai ketergantungan tinggi pada kemitraan tersebut. Pengembangan kredit baru yang terus dirintis adalah kredit mikro untuk pedagang ritel melalui kerjasama dengan pedagang grosir dan kredit konsumsi KTA, KPR, KKB dan kredit multiguna yang dikembangkan melalui program "*Corporate Partnership*". Sebagai tahap awal untuk penjangkauan, Bank telah bekerja sama dengan perusahaan Indogrosir untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dalam bentuk pemberian kredit mikro.

- ii. Mengusahakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *Cross Selling* dengan penyediaan layanan seperti *Pick Up Service*.
- iii. Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank.
- iv. Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *Risk and Return*.

b.) Operasional

- i. Pencapaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
- ii. Menyempurkan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan secara berkelanjutan pada kebijakan dan prosedurnya.
- iii. Memperkuat *Risk Control System* dengan prioritas untuk aktifitas perkreditan dan IT.
- iv. Menyempurnakan kebijakan-kebijakan di bidang operasional, perkreditan, dan kepatuhan yang merupakan konsekuensi sebagai perusahaan terbuka.

c.) Sumber Daya Manusia

- i. Memperkuat struktur organisasi di Kantor Pusat dalam kaitan pengembangan persiapan bisnis model baru, khususnya ketersediaan kompetensi di bidang SDM dan IT.
- ii. Meneruskan *Up Dating Job description* dan *Job Requirement* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.
- iii. Menyempurnakan struktur organisasi Kantor Cabang, disesuaikan dengan *size* bisnisnya agar mampu mengantisipasi risiko operasional maupun risiko kredit.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- iv. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi *assessment* dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, dan segi administrasi dan sistem informasi.
- d.) Lain-lain
 - i. Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
 - ii. Meningkatkan pemeriksaan internal dengan menggunakan sistem *scoring* penilaian audit.
 - iii. Melakukan relokasi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) dan Kantor Pusat Operasional (KPO) agar mampu memberikan *branding* baru. Untuk mempertahankan bisnis yang ada di tempat sekarang (Wisma BSG – Abdul Muis), direncanakan pembukaan kantor cabang pembantu sepanjang penambahan *tier* 1 dapat dipenuhi.
 - iv. Melakukan penggantian *Core Banking* Bank untuk dapat mengakomodasi perkembangan dan pertumbuhan layanan bisnis model yang baru.
 - v. Menambah modul aplikasi yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan pelayanan kepada nasabah seperti pengembangan *Debit Card* baik sebagai *Issuer* maupun *Acquirer* dan penambahan mesin EDC.
 - vi. Bergabung dengan jaringan PRIMA EFT *switching*, untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan dengan memanfaatkan mesin ATM anggota jaringan.
 - vii. Menambah mesin-mesin ATM pada kantor Bank, sekolah/ universitas serta lokasi lain yang sudah bekerjasama dengan Bank.
 - viii. Membuka *Payment Point* di toko-toko Indogrosir dalam rangka mengembangkan kredit mikro untuk membiataai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir.
- b. Target Jangka Menengah (Tahun 2017 – 2018)

Target jangka menengah ke depan diarahkan pada perwujudan bisnis baru sebagai Bank dengan layanan bisnis perbankan transaksi (*Transactional Banking*) dan penyaluran kredit segmen mikro dengan dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi. Sistem aplikasi yang dimiliki dapat menunjang kerja sama dengan perusahaan/ institusi yang memiliki kinerja baik (*Corporate Partnership*) seperti *Virtual Account*, *Card Based Transaction*, *Debit Card*, *Pre-loaded Card* dan *Internet Banking*.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Target Finansial dan Non Finansial

- 1.) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp2,16 triliun di tahun 2017 dan menjadi Rp2,53 triliun di tahun 2018.
- 2.) Meningkatkan kredit diberikan menjadi Rp1,79 triliun di tahun 2017 dan menjadi Rp2,07 triliun di tahun 2018.
- 3.) Total aset ditargetkan di tahun 2017 sebesar Rp2,70 triliun dan di tahun 2018 sebesar Rp3,10 triliun.
- 4.) Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing diperkirakan sebesar Rp20,25 miliar dan Rp24,34 miliar.
- 5.) Permodalan Bank dapat memenuhi persyaratan untuk pengembangan bisnis model baru berbasis IT.
- 6.) Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).
- 7.) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- 8.) Memperluas pengenalan *Corporate Brand Image*.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik tercermin pada komitmen PSP/PSPT baru untuk memperkuat permodalan bank, berupa penambahan kepemilikan modalnya pada Bank.

L. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *Homepage* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK baik berupa substansi laporan, media yang digunakan, maupun waktu pelaporan.

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Bank telah menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan untuk Tahun 2016, bertempat di Ruang Betawi II, Hotel Santika, Jl. Aipda KS. Tubun No. 7 Slipi-Jakarta. *Public Expose* merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka kepada *Stakeholders*.

Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik juga dilaksanakan oleh Bank yakni Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, Keterbukaan Informasi atas Berita Acara RUPS dan RUPSLB & Rencana PUT I BINA, Laporan Keuangan Interim dan Penyampaian Risalah Rapat dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Ina Perdana Tbk.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, pada tanggal 8 Desember 2016 Bank bekerja sama dengan PT Dana Mandiri Sejahtera mengadakan kegiatan CSR di Desa Cipaten, Padalarang - Jawa Barat dengan Tema acara "Merajut Kebersamaan Dengan Para Wanita Produktif Dalam Menyongsong Kemajuan Perekonomian Bangsa".

Dalam acara ini, Bank memberikan bantuan dalam bentuk bingkisan kepada 20 (dua puluh) orang *End User* dari mitra Bank - PT Dana Mandiri Sejahtera berupa bingkisan berupa alat dan bahan pendukung konveksi dan *fashion*. Penerima bantuan ini adalah wanita yang memiliki usaha di bidang konveksi yang memiliki reputasi yang baik sebagai nasabah PT Dana Mandiri Sejahtera. Dengan pemberian bingkisan ini, diharapkan penerima bingkisan dapat meningkatkan produktifitasnya di waktu yang akan datang.

- 000 -

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2016 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Dalam tahun 2016, Bank dikenakan denda oleh Otoritas sebesar Rp3.850.000 yakni Rp550.000 dikenakan oleh BI sebagai akibat koreksi penyampaian Laporan LBU secara *offline*, dan Rp3.300.000 dikenakan oleh OJK sebagai akibat kesalahan Laporan Publikasi Periode Juni 2016.

Dalam rangka meningkatkan Fungsi Kepatuhan guna meminimalisir pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lain, baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan bidang operasional sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih baik. Pelatihan dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Pelatihan secara internal dapat dilakukan oleh pengajar internal. Peningkatan kemampuan SDM juga dilakukan melalui rapat-rapat operasional.
2. Unit Kerja kepatuhan pada setiap akhir bulan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. guna mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Melalui penerbitan memo ini, unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada BI, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.

3. Peningkatan Bidang SDM dalam upaya peningkatan *control* telah dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan *training*, Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Kepatuhan dan pelaksanaan *assessment* calon pimpinan.
 - b. Untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam bekerja, sehingga setiap karyawan dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja, maka dalam periode laporan ini Bank telah menyempurnakan dan menerbitkan beberapa ketentuan internal untuk menyesuaikan dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.
 - c. Peningkatan *Internal Control* melalui:
 - 1) Pelaksanaan rotasi/mutasi karyawan.
 - 2) Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
 - 3) *Know Your Employee*.

Sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja, Unit Kerja HRD meminta bantuan Unit Kerja *Loan Admin* perusahaan melakukan *BI Checking* khususnya kepada Pejabat Bank.
 - 4) Arahan Pengurus Bank

Dalam Acara Sosialisasi Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*, Direktur Kepatuhan (Dirkep) ikut serta memberikan pengarahan kepada Peserta Sosialisasi, dimana Dirkep memberi motivasi kepada Peserta agar bekerja dengan baik dan senantiasa mengembangkan diri, jujur dan tetap menjauhkan diri dari tindakan *Fraud* yang dapat merugikan Perusahaan demikian juga diri sendiri.
 - 5) *Surprise Audit*

Dalam tahun 2016, *Internal Audit Group* tetap melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja karena dirasakan bahwa *Surprise Audit* merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya *Fraud*. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.
 - 6) Pengembangan *data based* SDM dengan sasaran untuk memudahkan bagi karyawan mendapatkan informasi langsung terkait SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

4. Bilamana ada Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari BI, OJK maupun Otoritas lainnya, maka Unit Kerja Kepatuhan menerbitkan memo pemberitahuan serta melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
5. Untuk lebih mengefektifkan penyampaian Memo, PPO, Kebijakan, Informasi, dll kepada karyawan, selain disampaikan dalam bentuk *Hard Copy* di sajikan juga dalam *Intra News* Bank Ina.
6. Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh Unit Kerja Kepatuhan.
7. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, dibahas dalam rapat tersendiri. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada Unit Kerja Kepatuhan.
8. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya, diadministrasikan oleh unit kerja Kepatuhan.
9. Untuk menambah rasa aman bekerja pada Karyawan, maka Bank menambah nilai Perlindungan Sosial kepada Karyawan, dimana selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Karyawan juga didaftarkan mengikuti asuransi kesehatan ke Asuransi PT Avrist Assurance.
10. Dalam upaya agar proses migrasi *Core Banking System* dari Teradata *Banking System* menjadi Temenos T 24 *Banking System* serta agar User/Pelaksana dapat memahami Temenos T 24 *Banking System*, maka telah dilakukan sosialisasi, uji coba, pengenalan dan pelatihan penggunaan Temenos T 24 *System Banking*, dan masih terus berlanjut sembari menunggu persetujuan dari OJK terkait pergantian *Core Banking System* tersebut.
11. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum, Unit Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan tentang Visi dan Misi Kepatuhan, yang merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari *Internal Audit Group* yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah personil *Internal Audit Group* sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang *Internal Audit Group Head* dan 2 (dua) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, *Internal Audit Group* telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh *Internal Audit Group* berupa *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan *Internal Audit Group* telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut agar menjadi perhatian *Auditee*.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2016 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/113/0816 tanggal 30 Agustus 2016, Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2015 disampaikan melalui surat No.OJK/DIR/023/0216 Tanggal 19 Februari 2016.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Laporan Hasil Kaji Ulang SKAI Periode Agustus 2011 s/d Juli 2014 oleh Sriyadi, Elly & Rekan Licence No.140/KM.1/2012 telah disampaikan Kepada OJK melalui surat No.OJK/DIR/072/0914 tanggal 18 September 2014.

C. Fungsi Audit Eksternal

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk tahun buku 2015, Bank menunjuk KAP Ernst & Young yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK dengan No.4. KAP telah menyampaikan “Laporan *Final Audit Report* dan *Management Letter*” kepada OJK secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan professional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Akta No 40 tanggal 12 Mei 2016 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk dan atas rekomendasi Komite Audit maka untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2016, Bank menunjuk KAP Ernst & Young yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain *Internal Audit Group*,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Upaya peningkatan *Risk Awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *Dual Control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *Fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan *Anti Conflict of Interest*. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi *Fraud*.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank juga telah mewajibkan sejumlah *Staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan.

Pada bulan Oktober 2016 Bank bekerja sama dengan LSPP melaksanakan *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko “*Operational Risk Management*” bagi karyawan yang akan habis masa berlaku Sertifikasi Manajemen Risikonya.

Pada bulan November 2016 Bank bekerjasama dengan PT. Arfaidhams Secret melaksanakan pembekalan kepada sebanyak 20 orang karyawan yang akan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko.

- 000 -

BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* TATA KELOLA

POSISI AKHIR DESEMBER 2016

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank, sebagaimana surat dari OJK No. S-47/PB 311/2016 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana.
2. Penguatan Permodalan
 - a. Pencapaian Rentabilitas yang semakin baik mendorong Pertumbuhan Organik dalam memperkuat permodalan Bank.
 - b. Dengan terlaksananya PUT I, maka Modal Bank semakin bertambah dimana penambahan modal tersebut dapat memenuhi Kebutuhan Modal Inti sesuai Jaringan Kantor.
 - c. Dengan adanya Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) yang saat ini masih dalam proses, maka dengan rencana penambahan Modal hasil PUT 2, Bank optimis dapat masuk dalam Kategori BUKU 2.
3. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh BI/ OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
4. *Internal Audit Group*, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
5. PT Bank Ina Perdana Tbk merupakan kategori BUKU 1, namun demikian mampu menunjukkan prestasi di dunia Perbankan Nasional. Di bawah kepemimpinan Bp. Edy Kuntardjo beserta Jajaran Pengurus lainnya, nama dan reputasi Bank semakin dikenal di dunia perbankan nasional, telah menjadi perusahaan “*Go Public*” yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Januari 2014. Selain itu juga menunjukkan prestasi dalam berbagai *Event* yang diselenggarakan oleh pemeringkat prestasi.

Sepanjang tahun 2016 ini ada 5 (lima) penghargaan yang diterima Bank, yakni:

- a. Pada tanggal 19 Oktober 2016 menerima penghargaan berupa *Most Efficient Bank* Kategori BUKU 1 dari Bisnis Indonesia *Banking Award*.
- b. Pada tanggal 7 September 2016 menerima penghargaan berupa *The Most Efficient Bank* Kategori Bank Konvensional Nasional Asset di bawah 20 T, dari *Indonesian Banking Award* Tempo Media Group.
- c. Pada tanggal 25 Agustus 2016 menerima penghargaan berupa Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015 dari Infobank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

- d. Pada tanggal 29 Januari 2016 menerima penghargaan *The Best Performing Bank Of The Year Indonesian Creativity And Best Leader Award 2016*.
- e. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima penghargaan *The Top 3 Best Banks* dari Warta Ekonomi.

Beberapa penghargaan lainnya yang diperoleh Bank dalam beberapa tahun belakangan ini, yakni:

- a. Pada tanggal 14 Agustus 2015, menerima penghargaan dari Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014”.
- b. Pada tanggal 22 Mei 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Business Professional & Education Award* sebagai “*The Most Improvement Bank of Year 2015*”.
- c. Pada tanggal 13 Maret 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai “*Leading Corporate In Finance Service of Year 2015*”.
- d. Pada tanggal 16 Januari 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader A Ward 2015* sebagai “*The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015*”.
- e. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category* “*The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014*”.
- f. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 *CEO in Leadership*”.
- g. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank Of The Year 2013*.
- h. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbanas berupa:
 - 1) Peringkat 1 Kategori *The Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp1 triliun.
 - 2) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Risk Management”* Bank Umum Aset < Rp1 triliun.
 - 3) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Marketing”* Bank Umum Aset < Rp1 triliun.
- i. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

Jakarta, 21 Maret 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk



Birawa Natapradja
Komisaris Utama Independen



Edy Kuntardjo
Direktur Utama

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk

Posisi : 31 Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank Ina Perdana (“Bank”), disimpulkan Pelaksanaan GCG memperoleh peringkat 2 (dua) atau “Baik”. dengan pertimbangan bahwa Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Melalui Surat No. SR-65/D.03/2016 Tanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk. OJK menyetujui Sdr. Josavia Rachman Ichwan sebagai Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk. Dengan adanya persetujuan dari OJK, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016 yang dituangkan dalam akta No. 42 tanggal 12 Mei 2016, diantaranya telah memutuskan mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menambah seorang Direktur yang baru. Melalui Surat No. S-47/PB 311/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa susunan Pengurus PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai berikut: 		

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis

2. Kinerja Bank sampai dengan akhir Desember tahun 2016 dalam menghasilkan laba (rentabilitas) dinilai cukup baik dengan perolehan laba di atas target yang ditetapkan walaupun target *Assets*; *Funding*; dan *Lending* belum tercapai 100%. Pencapaian target s/d posisi 31 Desember 2016 dapat dilihat sbb:

Dalam jutaan rupiah

Item	<u>Realisasi</u>	Target	Pencapaian (%)
Assets	2.359.512	2.437.881	96,79
Funding	1.800.961	1.924.936	93,56
Lending	1.378.154	1.555.728	88,59
Profit/Loss	18.353	16.818	109,13

3. Penguatan Permodalan

- ~ Pencapaian Rentabilitas yang semakin baik mendorong Pertumbuhan Organik dalam memperkuat permodalan Bank.
- ~ Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016, yang dihadiri sebanyak 98,98% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen) pemegang saham Perseroan diantaranya memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 625 Juta Saham Biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.100,-. Berdasarkan Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) PT Bank Ina Perdana Tbk, telah terjual seluruh saham yang ditawarkan yakni sebanyak 625 Juta lembar saham dengan Harga Penawaran Saham Rp. 240, sehingga Dana Setoran PUT I sebesar Rp. 150 Miliar. Dalam PUT I tersebut, PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja sebagai PSP Bank melaksanakan seluruh haknya atas HMETD, maka porsi kepemilikan saham mereka tetap yakni PT Philadel Terra Lestari sebanyak 20% (dua puluh persen) dan Bpk. Oki

Widjaja sebanyak 4% (empat persen).

- ~ Selanjutnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2016, yang dihadiri sebanyak 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) Pemegang Saham Perseroan, memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan.

Penambahan modal tersebut dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham. Adapun Saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 2.929.375.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.100,- per saham baru. Setiap Pemegang 1.000 Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Februari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.075 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp.240,-. Saham yang diterbitkan dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.703.050.000.000,-. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT II, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan Modal Inti Perseroan. Proses Pelaksanaan PUT II sedang berjalan dan masih menunggu pernyataan efektif dari OJK.

4. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *Fraud*:

- a. Dalam upaya mencegah terjadinya *Fraud*, maka Bank juga telah menyelenggarakan Sosialisasi terkait mengenai Pengendalian Intern dan Anti *Fraud* kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank:

No	Kantor	Tanggal	Peserta
1.	Kantor Abdulmuis	17 Desember 2016	13 Orang

Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Intern dan Anti *Fraud* kepada karyawan ini, akan dilanjutkan ke seluruh Kantor Cabang/Capem & Kantor Kas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

- b. Untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, maka pada periode Laporan Semester II/2016, telah dilakukan juga :
 - ~ Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
 - ~ Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
 - ~ Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
- c. Program *Surprise Audit*.

Pada periode Semester II/2016, *Internal Audit Group* tetap melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang, karena dirasakan bahwa *Surprise Audit* merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya *Fraud*.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016

Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.

d. *Know Your Employee*

~ Sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja, maka Unit Kerja HRD meminta bantuan Unit Kerja *Loan Admin* perusahaan melakukan *BI Checking* khususnya kepada Pejabat Bank.

5. Sepanjang periode Laporan ini Bank, senantiasa mampu menjaga ratio-ratio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang periode laporan ini, Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian pada Periode Laporan ini masih dijumpai adanya pengenaan denda sebesar Rp. 3.700.000,- yaitu:

1. Denda oleh Bank Indonesia (BI) sebesar Rp. 400.000,-. disebabkan penyampaian Koreksi LBU. Surat BI No.18/210/DPKL-GPPP1-PPw1/Srt/Rhs Tanggal 26 September 2016 Perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara *Off Line* LBU disebabkan penyampaian Koreksi LBU.
2. Denda oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp. 3.300.000,- disebabkan adanya kesalahan pelaporan LBU Form 11. Surat OJK No.S-19/PB 3112/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Laporan Keuangan Publikasi Periode Juni 2016.

Dalam periode laporan ini, ada ditemukan *Fraud* namun tidak merugikan Bank secara materil, yang terjadi akibat kelemahan pengendalian intern di cabang:

1. Adanya calon Debitur Bank Commonwealth yang menggunakan Deposito Bank Ina sebagai bukti kepemilikan asset debitur yang setelah dilakukan konfirmasi oleh Bank Commonwealth ke Bank Ina diketahui bahwa bilyet deposito tersebut tidak tercatat di Bank Ina.
2. Terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan uang muka biaya untuk kepentingan pribadi pejabat akibat kelemahan aspek pengendalian intern di cabang yang dapat terdeteksi dalam pelaksanaan audit oleh *Internal Audit Group*.

Jakarta, 27 Januari 2017
PT Bank Ina Perdana Tbk



Wardoyo
Direktur Kepatuhan